

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

SBuatu negara terdapat suatu tujuan untuk sebuah pembangunan nasional yang mengusung tujuan utama dalam mensejahterakan masyarakat secara adil, Merata dan makmur di setiap bagian wilayah serta daerahnya Pemerintah sudah mengarahkan berbagai kegiatan pembangunan nasional ke arah Pembangunan yang merata pada setiap daerah-daerah, dimana kegiatan pembangunan daerah dalam pelaksanaannya untuk menciptakan dan membangun kegiatan ekonomi di wilayah tersebut agar lebih berkembang. Namun dalam realisasinya masih cenderung terdapat kelemahan yang dimiliki yaitu dalam penerimaan pendapatan (Astuti, 2021).

Pembangunan daerah ini dapat melaksanakan tujuan utamanya secara maksimal hanya jika pembangunan ini menerapkan kebijakan dari pemerintah yang berupa adanya kebijakan otonomi daerah .Otonomi daerah di dalamnya memuat hak, kewajiban dan wewenang masing- masing daerah untuk mengatur dan mengurus setiap kegiatan yang ada di wilayahnya berdasarkan aturan –aturan yang sudah tertulis dalam Undang-Undang yang berlaku untuk mencapai tujuan utama dalam menciptakan kesejahteraan dengan peningkatan dalam perekonominya pendapatan yang sah. Di dalam UU Nomor 33 tahun 2004 dijelaskan tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah dan

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, pendapatan asli daerah ini digunakan untuk tujuan agar suatu daerah lebih leluasa dalam pendanaan pelaksanaan otonomi daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap perekonomian suatu daerah.

Suatu daerah yang memiliki perolehan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi maka semakin tinggi pula kemandirian dalam daerah tersebut khususnya dalam kemandirina ekonomi sehingga daerah tersebut dapat dikatakan bahwa memiliki pertumbuhan perekonomian yang baik. Akan tetapi, ada juga dari fakta yang terjadi dalam suatu wilayah masih sulit menyeimbangkan jumlah Pendapatan Asli Daerah sehingga ketidak seimbangan ini akan dapat menimbulkan ketidak merataan pembangunan daerah. Dimana faktor penyebab terjadinya adalah adanya perbedaan potensi yang dimiliki pada setiap daerah (Ariska, 2021).

Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terdiri dari 13 kabupaten dan 4 kota yang masih memiliki masalah ketimpangan fiskal dalam sumber pendanaan dan pendapatan asli daerah pada beberapa kabupaten dan kota. Ketimpangan fiskal dalam hal ini daerah belum mampu mencukupkan belanja dan biaya daerah melalui sumber pendanaan asli daerah secara murni. Dengan demikian, tingkat ketergantungan pemerintah daerah cukup tinggi terhadap pemerintah pusat. Perlunya perencanaan anggaran yang matang demi tercapainya pembangunan daerah yang bersinergi. Berbicara terkait keberhasilan perekonomian hal ini dapat dilihat dari adanya penduduk, yang mana penduduk merupakan penggerak dari sektor-sektor perekonomian.

Apabila jumlah penduduk sebagai sumber daya manusia lebih produktif dalam mengembangkan produksi barang dan jasa maka akan terjadi peningkatan dalam transaksi jual beli. Pembangunan Ekonomi daerah adalah suatu proses dan kegiatan dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat baik dari lembaga maupun individu untuk mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2014 : 110).

Dengan meningkatnya aktivitas penduduk Provinsi Sumatera Selatan akan menyebabkan terjadinya kenaikan terhadap permintaan barang dan jasa, sehingga permintaan berlebihan ini akan memicu terjadinya inflasi. Sehingga inflasi ini akan memicu kondisi perekonomian yang buruk jika tidak ada pengendalian yang dilakukan. Tingkat inflasi yang aman adalah kurang dari 10% dan jika melebihi 25% akan memicu adanya kenaikan harga dari barang ataupun jasa dan juga menyebabkan nilai tukar rupiah menurun (Oktiani, 2021).

Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Inflasi menimbulkan beberapa efek buruk pada perekonomian salah satunya mengurangi pendapatan riil (Sukirno, 2016 : 334). Tetapi dengan adanya inflasi maka upah atau gaji juga naik, karena upah riil tergantung pada produktivitas marjinal tenaga kerja. Kesejahteraan ekonomi tergantung pada harga relatif, bukan pada seluruh tingkat harga. Penelitian Simanjuntak dalam Halim mengemukakan bahwa inflasi akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan, misalnya pajak hotel dan pajak restoran. karena

jika inflasi melambat, pengusaha akan cenderung menaikkan sedikit harga tetapi upah yang dibayarkan tetap.

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah nilai total dari seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu wilayah geografis tertentu (misalnya, provinsi atau kabupaten/kota) selama satu periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). Angka Produk Domestik Regional Bruto digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Kuncoro menyatakan bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih di maknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto pada dasarnya merupakan nilai tambah yang di hasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang di hasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang di hitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang di hitung menggunakan harga berlaku pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku di gunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran dan sruktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, Produk Domestik

Regional Bruto atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak di pengaruhi oleh faktor harga.

Tabel 1.1
DATA JUMLAH PENDUDUK,INFLASI,PDRB,PAD TAHUN 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)	Inflasi (%)	PDRB (Miliar Rupiah)	PAD (Jutaan)
2020	8.467.432	1,68	454.607,40	3.375.100.984,84
2021	8.550.849	1,82	493.636,90	3.865.463.033,09
2022	8.657.008	5,95	590.079,40	4.930.955.849,52
2023	8.743.522	3,17	629.168,70	5.202.956.071,30
2024	8.837.301	1,57	663.961,70	5.309.757.143,24

Sumber :Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan PAD tersebut mencerminkan semakin tingginya kemampuan Provinsi Sumatera Selatan dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah secara mandiri. Hal ini menjadi fenomena penting karena meningkatnya PAD menunjukkan adanya kemandirian fiskal daerah yang menandakan efektivitas pengelolaan keuangan serta meningkatnya partisipasi ekonomi masyarakat melalui pajak dan retribusi daerah. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah juga mengindikasikan semakin optimalnya aktivitas ekonomi pada sektor-sektor terkait seperti industri, perdagangan, serta sektor jasa yang turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Selanjutnya, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun

2020 jumlah penduduk tercatat sebanyak 8.467.432 jiwa, meningkat menjadi 8.550.849 jiwa pada tahun 2021, kemudian 8.657.008 jiwa pada tahun 2022, 8.743.522 jiwa pada tahun 2023, dan mencapai 8.837.301 jiwa pada tahun 2024. Peningkatan jumlah penduduk ini juga dapat dijadikan fenomena karena berdampak langsung terhadap perekonomian daerah. Bertambahnya jumlah penduduk dapat memberikan dampak positif berupa meningkatnya produktivitas tenaga kerja, peluang usaha, serta penerimaan pajak daerah. Namun, jika tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai, peningkatan jumlah penduduk justru dapat menimbulkan masalah baru seperti pengangguran dan ketimpangan ekonomi.

Sementara itu, inflasi di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 tingkat inflasi tercatat sebesar 1,68%, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 1,82%. Pada tahun 2022 inflasi mengalami lonjakan cukup tinggi sebesar 5,95% akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), gas, dan bahan pangan. Namun, pada tahun 2023 inflasi menurun menjadi 3,17%, dan kembali turun pada tahun 2024 menjadi 1,57%. Fluktuasi inflasi ini juga merupakan fenomena penting karena mencerminkan stabilitas ekonomi daerah. Inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat, sedangkan inflasi yang terlalu rendah dapat menandakan lesunya aktivitas ekonomi. Untuk menjaga kestabilan harga, pemerintah menjalankan kebijakan fiskal, antara lain dengan menekan pengeluaran pemerintah atau menaikkan nilai pajak guna menstabilkan perekonomian daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Selatan pada periode 2020–2024 juga mengalami naik turun di setiap tahunnya. Pada tahun 2020, PDRB mengalami penurunan cukup besar sebesar 315.129,22 miliar rupiah akibat dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembatasan sosial dan melemahnya aktivitas ekonomi. Kemudian pada tahun 2021, PDRB meningkat menjadi 326.405,18 miliar rupiah seiring dengan berkurangnya dampak pandemi, program vaksinasi, dan dukungan pemerintah terhadap pemulihan ekonomi. Selanjutnya, pada tahun 2022 PDRB meningkat lebih tinggi menjadi 343.503,62 miliar rupiah, didorong oleh meningkatnya investasi dalam dan luar negeri serta kenaikan harga komoditas unggulan seperti karet dan batubara. Kenaikan berlanjut pada tahun 2023 sebesar 360.967,45 miliar rupiah, didukung oleh pulihnya sektor pengolahan dan jasa keuangan, serta pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 379.119,63 miliar rupiah akibat membaiknya pasar internasional dan sektor pariwisata. Kondisi ini menjadi fenomena yang menarik karena menunjukkan kemampuan Provinsi Sumatera Selatan untuk pulih dari tekanan ekonomi global dan pandemi melalui peningkatan produktivitas dan diversifikasi sektor ekonomi.

Pertumbuhan kegiatan ekonomi dalam masyarakat akan berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Meningkatnya aktivitas ekonomi mendorong kenaikan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan konsumsi dan pembayaran pajak daerah. Namun demikian, apabila inflasi tidak terkendali, hal tersebut dapat menurunkan daya beli masyarakat yang akhirnya berdampak pada menurunnya penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, kestabilan

inflasi, pertumbuhan ekonomi (PDRB), dan dinamika jumlah penduduk memiliki hubungan yang erat dalam memengaruhi tingkat Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan Latar Belakang Tersebut dapat dilihat bahwa kondisi di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan hubungan yang saling memengaruhi antara jumlah penduduk, inflasi, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah. Maka peneliti tertarik untuk meneliti **"Pengaruh Jumlah Penduduk , Inflasi Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan"**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan dalam penelitian ini adalah :Apakah Jumlah Penduduk (X1) Inflasi (X2) dan Produk Domestik Regional Bruto (X3) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)(Y) Provinsi Sumatera Selatan baik secara parsial maupun secara bersama-sama ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk ,inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah dapat mengetahui pengaruh jumlah penduduk,Inflasi danProduk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapaatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan.